

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa

Yani Rizal<sup>1</sup>, Erpita<sup>2</sup>

*Fakultas Ekonomi Universitas Samudra*

<sup>1</sup>*email:* [yanirizal@unsam.ac.id](mailto:yanirizal@unsam.ac.id)

<sup>2</sup>*email:* [erpita@gmail.com](mailto:erpita@gmail.com)

### Abstrak

*Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh PAD terhadap belanja modal di Kota Langsa. Data yang digunakan adalah data time series mengenai PAD dan belanja modal Kota Langsa tahun 2006-2017. Metode analisis data meliputi analisis regresi linier sederhana, uji t, dan analisis koefisien determinasi. Dari analisis regresi linier sederhana diperoleh persamaan regresi  $Y = 2,186 + 1,211X$ . Konstanta sebesar 2,186 berarti bahwa peningkatan alokasi belanja modal yaitu sebesar 2,186 persen apabila tidak ada peningkatan pendapatan asli daerah. Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah menunjukkan pengaruh positif terhadap belanja modal sebesar 1,211. Dari hasil uji t dapat dijelaskan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Langsa, dimana diperoleh nilai t-hitung > t-tabel ( $1,986 > 1,833$ ). Dari analisis koefisien determinasi diketahui bahwa pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja modal Kota Langsa sebesar 40,6%, sedangkan sisanya 59,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.*

**Kata Kunci:** *Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal*

### 1. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Kota Langsa merupakan salah satu kota di Aceh berdasarkan Undang-undang dasar Nomor 3 tanggal 21 Juni Tahun 2001. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan Kota Langsa terus mendorong peningkatan PAD untuk membiayai belanja publik.

Perkembangan PAD Kota Langsa dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

**Tabel 1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2006-2015**

Tahun	PAD (rupiah)	Perkembangan (%)
2006	11.537.823.450	-
2007	16.610.316.787	43,96
2008	23.447.600.000	41,16
2009	27.441.900.000	17,03
2010	24.969.857.280	-9,00
2011	36.310.437.019	45,41
2012	35.464.721.911	-2,32
2013	57.587.026.529	62,37
2014	69.070.631.087	19,94
2015	110.346.992.330	59,75

Sumber: Bappeda Langsa (2018)

Berdasarkan table I dapat diketahui perkembangan PAD Kota Langsa sejak tahun 2006-2015 dimana peningkatan PAD tertinggi yaitu pada tahun 2013 yang mencapai 62,37% dan realisasi PAD sebesar Rp 57,58 miliar. Pada tahun 2010 realisasi PAD mengalami penurunan 9%, dimana pada tahun 2010 realisasi PAD sebesar Rp.24,96 miliar.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal di Kota Langsa.

## 2. KAJIAN KEPUSTAKAAN

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.

Saragih (2005:127) menyatakan, APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2007:15-16) adalah sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci,
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka,
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

Unsur-unsur APBD berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2006:35):

1. Pendapatan Daerah  
Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum Daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Asli Daerah  
Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan

yang terdiri atas:

- 1) Pajak Daerah,
  - 2) Retribusi Daerah,
  - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
  - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. Dana Perimbangan
- 1) Dana Bagi Hasil,
  - 2) Dana Alokasi Umum,
  - 3) Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1) Hibah berasal dari Pemerintah, pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, kelompok Masyarakat/ Perorangan, dan Lembaga Luar Negeri yang Tidak mengikat,
  - 2) Dana Darurat dari Pemerintah dalam Rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam,
  - 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota,
  - 4) Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh pemerintah,
  - 5) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya.

## 2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, Belanja terdiri dari:

- a. Belanja Aparatur Daerah,
- b. Belanja Pelayanan Publik,
- c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan,
- d. Belanja Tidak Tersangka.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Menurut kelompok belanja terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai,
- 2) Bunga,
- 3) Subsidi,
- 4) Hibah,
- 5) Bantuan Sosial,
- 6) Belanja Bagi Hasil,
- 7) Bantuan Keuangan,
- 8) Belanja Tidak Terduga.

## b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai, dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah,
- 2) Belanja Barang dan Jasa, dan
- 3) Belanja Modal.

## 3. Pembiayaan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan

dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).

Menurut Halim (2007:67) Unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Saragih (2007: 61), yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Halim (2007:67), pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Adapun jenis-jenis pajak daerah untuk Kabupaten/Kota antara lain ialah:

- a. Pajak hotel,
- b. Pajak restoran,
- c. Pajak hiburan,
- d. Pajak reklame,
- e. Pajak penerangan jalan,
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
- g. Pajak parkir.

#### 2. Retribusi Daerah

Menurut Saragih (2003:65) retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Halim (2007:67), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi untuk Kabupaten/Kota dapat dibagi menjadi 2, yakni:

- a. Retribusi untuk Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah, terdiri dari: 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan tertentu.
- b. Retribusi untuk Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang

diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari: 13 jenis retribusi jasa usaha.

#### 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim (2007:68), hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Bagian laba perusahaan milik daerah,
- 2) Bagian lembaga keuangan bank,
- 3) Bagian laba lembaga keuangan non Bank,
- 4) Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

#### 4. Lain-lain PAD yang Sah

Menurut Halim (2007:69), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Adapun jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan,
- 2) Penerimaan jasa giro,
- 3) Penerimaan bunga deposito,
- 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah

### **Pengeluaran Pemerintah**

Menurut Sukirno (2011:61), pengeluaran (perbelanjaan) pemerintah adalah perbelanjaan pemerintah terhadap barang-barang modal, barang konsumsi dan jasa-jasa. Sedangkan menurut Amri (2008:69), pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan sebagai berikut (Amri, 2008:72):

#### 1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

## 2. Pengeluaran Pembangunan Fisik

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan ruman sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Mankiw (2007:152) menjelaskan pengeluaran pemerintah yang didistribusikan dengan daya beli ditengah masyarakat disebut dengan pembayaran transfer pemerintah. Pembayaran transfer ini membuat sumber- sumber pendapatan menyokong pada penerimaan yang tidak mampu menyediakan pelayanan sebagai implan dari pendapatan yang diterima kemudian. Defisit anggaran dapat mempengaruhi alokasi sumber daya (dengan mempengaruhi pengeluaran-pengeluaran pemerintah) dan seluruh ukuran sektor pemerintah dalam perekonomian. Defisit juga dapat mempengaruhi harga dan tingkat bunga dengan demikian mempengaruhi distribusi pendapatan.

Mankiw (2007:155) menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi utama keuangan pemerintah, sebagai berikut:

1. Fungsi alokasi adalah merupakan proses dimana sumber daya (resources) nasional

yang digunakan untuk barang privat dan barang publik seperti diketahui masyarakat membutuhkan baik barang privat maupun barang publik.

2. Fungsi distribusi, pada hakekatnya merupakan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan dan merupakan anggaran yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi masalah kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat.
3. Fungsi stabilisasi, penggunaan kebijaksanaan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga dan laju pertumbuhan ekonomi, yang memadai dengan memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran.

Menurut Asfia (2006:98), hal-hal yang menentukan pengeluaran pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima
2. Memanipulasi/mengatur arah kegiatan ekonomi
3. Pertimbangan politik dan keamanan

Menurut Suminto (2004:26) format belanja negara adalah sebagai berikut:

### 1. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari:

#### a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, dan membayar honorarium, lembur, tunjangan khusus dan belanja pegawai, serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan (kontribusi sosial). Dalam klasifikasi tersebut termasuk pula belanja gaji/upah proyek yang selama ini diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan.

Dengan format ini, maka akan terlihat pos yang tumpang tindih antara belanja pegawai yang diklasifikasikan sebagai rutin dan pembangunan. Di sinilah nantinya efisiensi akan bisa diraih (Suminto, 2004:27).

b. Belanja Barang

Belanja barang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan untuk pengadaan barang dan jasa, dan biaya pemeliharaan aset negara. Demikian juga sebaliknya sering diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan (Suminto, 2004:27).

c. Belanja Modal

Belanja modal menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya). Pos belanja modal dirinci atas belanja modal aset tetap/fisik dan belanja modal aset lainnya/non- fisik. Dalam prakteknya selama ini belanja lainnya non fisik secara mayoritas terdiri dari belanja pegawai, bunga dan perjalanan yang tidak terkait langsung dengan investasi untuk pembangunan (Suminto, 2004:27).

d. Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang adalah Pembayaran bunga utang yang meliputi utang dalam negeri dan utang luar negeri.

e. Subsidi

Subsidi menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membayar beban subsidi atas komoditas vital dan strategis tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam rangka menjaga stabilitas harga agar dapat terjangkau oleh sebagian besar golongan masyarakat. Subsidi tersebut dialokasikan melalui perusahaan negara dan perusahaan swasta (Suminto, 2004:27).

f. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan.

g. Bantuan Sosial

Bantuan sosial menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan sebagai transfer uang/barang yang diberikan kepada penduduk, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, misalnya transfer untuk pembayaran dana kompensasi sosial.

h. Belanja Lain-Lain

Belanja lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

2. Belanja Untuk Daerah

Menurut Suminto (2004:27), belanja untuk daerah adalah belanja untuk menampung seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

**Belanja Modal**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) mendefinisikan belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila (Mardiasmo, 2006:86):

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bappeda Kota Langsa.

#### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen (PAD) terhadap variabel dependen (belanja modal), menggunakan model ekonometrika dengan persamaan regresi linear sederhana yang kemudian dimodifikasi berdasarkan variabel penelitian sebagai berikut :

$$Y = \alpha + bX$$

Dimana :

Y = Belanja Modal

$\alpha$  = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Pendapatan Asli Daerah

Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t), dan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### HASIL PENELITIAN

##### Perkembangan PAD Kota Langsa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diandalkan bagi setiap daerah termasuk keuangan daerah Kota Langsa yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah di daerah

dan ditambah dengan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan pemerintah daerah. Lebih dari 90% dana pemerintah daerah yang sekaligus memperlihatkan pendapatannya bersumber dari dana perimbangan terutama Dana Alokasi Umum guna membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah. Perkembangan PAD Kota Langsa dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

**Tabel 2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2006-2017**

Tahun	PAD (Rupiah)	Perkembangan (%)
2006	11.537.823.450	-
2007	16.610.316.787	43,96
2008	23.447.600.000	41,16
2009	27.441.900.000	17,03
2010	24.969.857.280	-9,00
2011	36.310.437.019	45,41
2012	35.464.721.911	-2,32
2013	57.587.026.529	62,37
2014	69.070.631.087	19,94
2015	110.346.992.330	59,75
2016	120.337.863.917	8,30
2017	124.092.504.605	3,02

Sumber: Bappeda Langsa (2018)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa PAD Kota Langsa pada tahun 2006 adalah Rp 11,53 miliar dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 43,96% dengan nilai PAD Rp 16,61 miliar. Pada tahun 2009 PAD Kota Langsa meningkat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,03% dengan nilai PAD Rp 27,44 miliar dan pada tahun 2010 mengalami penurunan 9% dengan nilai PAD Rp 24,96 miliar. Hal ini dikarenakan pemungutan retribusi yang belum optimal. Pada tahun 2011 PAD kembali meningkat hingga mencapai 45,41% dengan nilai PAD Rp 36,31% dan pada tahun 2012 PAD mengalami penurunan 2,32%, hal ini disebabkan salah satunya karena daya beli masyarakat yang mengalami penurunan. Pada tahun 2013 PAD meningkat drastis sebesar 62,37% dengan nilai PAD 57,58% dan ini

merupakan peningkatan tertinggi dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Hingga tahun 2017 PAD Kota Langsa adalah Rp 1.224,09 miliar.

**Perkembangan Belanja Modal di Kota Langsa**

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Adapun perkembangan belanja modal di Kota Langsa dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

**Tabel 4. Perkembangan Belanja Modal di Kota Langsa Tahun 2006 – 2017**

Tahun	Belanja Modal (Rupiah)	Perkembangan (%)
2006	76.407.545.044	-
2007	80.933.646.979	5,92
2008	66.311.058.352	18,06
2009	69.602.725.038	4,96
2010	70.168.062.360	0,81
2011	95.365.497.758	35,91
2012	48.593.745.283	-49,04
2013	50.759.677.271	4,45
2014	149.426.250.972	194,37
2015	162.348.727.994	8,64
2016	173.224.577.219	6,69
2017	191.493.165.266	10,54

Sumber: Bappeda Langsa (2018)

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2006 belanja modal Kota Langsa adalah Rp 76,40 miliar lalu mengalami peningkatan sebesar 5,92% pada tahun 2007 menjadi 80,93 miliar. Pada tahun 2008 belanja modal

meningkat sebesar 18,06% menjadi Rp 66,13 miliar, namun pada tahun 2009 belanja modal meningkat hanya 4,96%. Pada tahun 2010 belanja modal meningkat hanya 0,81% yaitu Rp 70,16 miliar. Pada tahun 2011 belanja modal meningkat cukup signifikan mencapai 35,91% namun pada tahun 2012 mengalami penurunan 49,04% dimana belanja modal adalah Rp 48,59 miliar. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan APBK Langsa yang juga dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah Peningkatan belanja modal tertinggi yaitu pada tahun 2014 mencapai 194,37% dengan nilai belanja modal Rp 149,42 miliar. Hingga tahun 2017 belanja modal yaitu Rp 191,49 miliar.

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Langsa**

Pengaruh Pendapatan asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Langsa dapat dilihat pada tabel 4. Dari Tabel 4 dapat diketahui persamaan regresi linear sederhana berikut:

$$Y = 2,186 + 1.211 X$$

1. Nilai konstanta sebesar 2,186 berarti apabila Pendapatan Asli Daerah tetap atau tidak mengalami perubahan maka belanja modal pemerintah Kota Langsa sebesar 2,186 rupiah.
2. Koefisien regresi pendapatan asli daerah menunjukkan pengaruh positif terhadap belanja modal sebesar 1,211 artinya apabila pendapatan asli daerah meningkat 1 rupiah maka akan terjadi peningkatan belanja modal pemerintah Kota Langsa sebesar 1,211 rupiah.

**Tabel 4. Hasil Analisis Statistik**

Variabel	B	T	Sig. t
Konstanta	2.186	3.665	.000
PAD	1.211	1.986	.031
R Square	.406		
R	.411 <sup>a</sup>		
Adjusted R Square	.392		

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2018

Analisis selanjutnya yaitu analisis koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas dapat dijelaskan oleh variabel terikat. Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa nilai R Square adalah 0,406, hal ini berarti bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) mempengaruhi belanja modal pemerintah Kota Langsa sebesar 40,60%. sedangkan selebihnya 59,40% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

### Pengujian Hipotesis

Pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t atau uji signifikan secara parsial dapat diketahui dengan 5% (0,05) yaitu yang dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat nilai t-hitung PAD sebesar 1,986. Sedangkan t-tabel pada  $\alpha = 5\%$  adalah 1,833. Oleh karena t-hitung  $>$  t-tabel (1,986  $>$  1,833) maka dapat dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Langsa. Dengan demikian maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprianto (2016) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

### 5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari analisis regresi linier sederhana diperoleh persamaan regresi  $Y = 2,186 + 1,211X$ . Konstanta sebesar 2,186 berarti bahwa peningkatan alokasi belanja modal yaitu sebesar 2,186 persen apabila tidak ada peningkatan pendapatan asli daerah. Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah menunjukkan pengaruh positif terhadap belanja modal sebesar 1,211.
2. Dari hasil uji t dapat dijelaskan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Langsa, dimana

diperoleh nilai t-hitung  $>$  t-tabel (1,986  $>$  1,833).

3. Dari analisis koefisien determinasi diketahui bahwa pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja modal Kota Langsa sebesar 40,60%, sedangkan selebihnya 59,40% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

### 6. REFERENSI

- Amri, Amir. 2008. **Teori Ekonomi Makro**. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. **Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3**. Jakarta: Erlangga.
- Ismail, M. 2005. **Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah**. Malang: FE Unibraw.
- Mardiasmo. 2006. **Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: Andi.
- Martini . 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012. **Jurnal Ekonomi Pembangunan**. Vol 1. No 1. Hal 1-15.
- Putriasani. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Implikasinya pada Belanja Modal dan Implikasinya pada Belanja Pemeliharaan (Studi pada Pemerintah Kota Cirebon). **Jurnal Ekonomi Pembangunan**. Vol 1. No1. Hal 1-21.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 **Tentang Pemerintahan Daerah**.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 **Tentang Pajak dan Retribusi Daerah**.
- Republik Indonesia. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah**.
- Republik Indonesia. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**.
- Saragih, Juli Panglima. 2005. **Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah**

**dalam Otonomi.** Jakarta: Gahalia Indonesia.

Sugiyono. 2006. **Statistika Untuk Penelitian.** Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2011. **Makro Ekonomi.** Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumarmi. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. **E-Journal Bisma.** Vol 2. No 1. Hal 1-17